



**▶ KARTU MENUJU SEJAHTERA**

## 62 KK Tidak Mau Disebut Miskin

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja menetapkan sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa masuk kategori miskin yang perlu dibantu melalui program kartu menuju sejahtera (KMS) tahun ini.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 18.651 KK atau 60.215 jiwa pemegang KMS. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya meninggal dunia, pindah domisili ke luar Jogja dan data ganda. "Ada juga yang tidak mau didata sebanyak 62 KK, artinya ini sudah sejahtera tidak perlu lagi dibantu," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Jogja, Bejo Suwarno, se usai rapat bersama Komisi D DPRD Kota Jogja, Selasa (9/1).

Jumlah penerima KMS tahun ini terbanyak di Kecamatan Mergangsan 2.137 KK atau 6.801 jiwa, disusul Umbulharjo 1.917 KK atau 6.243 jiwa, Tegalrejo 1.711 KK (5.477 jiwa). Kemudian paling sedikit ada di Kecamatan Pakualaman 475 KK (1.575 jiwa) dan Kecamatan Ngampilan 508 KK (1.561 jiwa).

Bejo mengatakan pendataan warga penerima KMS tahun ini masih menggunakan parameter lama yang ditetapkan oleh Wali Kota Jogja. Parameter yang dimaksud adalah Keputusan Wali Kota Jogja No.325/KEP/2016 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Jogja.

Terdapat tujuh aspek dan 17 parameter yang dinilai mulai dari pendapatan di bawah Rp400.000, papan atau tempat tinggal rata-rata setiap anggota keluarga kurang dari lima meter dan bahan dinding rumah bukan tembok.

**62 KK...**

Sementara dari aspek pangan, warga tidak mampu memberi makan anggota keluarganya tiga kali dalam sehari, warga hanya mampu membeli pakaian maksimal hanya satu kali dalam setahun. Dari aspek kesehatan, warga tidak mampu membayar puskesmas, tempat buang air besar bukan di MCK, sumber air minum bukan PDAM.

Dari aspek pendidikan, kepala keluarga maksimal lulusan SMP dan memiliki tanggungan anggota keluarga yang masih sekolah.

Lebih lanjut Bejo berujar, pemegang KMS dibagi dalam tiga kategori, yakni miskin, fakir miskin, dan rentan miskin. Pihaknya tahun ini berencana menambah satu kategori lagi, yakni warga yang sudah mampu namun masih perlu bantuan misalnya soal pekerjaan. Namun tambahan kategori tersebut masih dibahas bersama Dewan.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan selama ini intervensi pemerintah terhadap warga yang sudah tidak lagi memenuhi syarat pemegang KMS tidak ada sehingga warga yang dianggap sudah mampu rentan kembali lagi menjadi miskin. Atas dasar itu, pihaknya berharap kelompok yang lepas dari bantuan pemerintah nantinya bisa memotivasi dirinya sendiri dan masyarakat agar lebih baik. "Harapannya yang lepas dari kemiskinan bisa terus naik kelas, tidak lagi jatuh miskin," kata Heroe.

Heroe melanjutkan perlu ada intervensi dalam bentuk program lainnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja, Dwi Budi Utomo menilai selama ini KMS hanya dimanfaatkan untuk mengakses kesehatan, pendidikan dan santunan kematian. Ia belum melihat ada intervensi program lain untuk para pemegang KMS sehingga jumlah pemegang KMS selalu banyak karena intervensi pemerintah yang terbatas.

Dwi Budi berharap data KMS menjadi pijakan bagi sejumlah instansi lain untuk membantu pengentasan kemiskinan. Padahal, kata dia, penanggulangan kemiskinan tidak hanya melalui pendidikan dan kesehatan, melainkan ada penguatan mental warga miskin, dan pelayanan jaminan ketersediaan pangan.

"Perlu ada intervensi program semua instansi agar warga miskin tidak hanya mendapat KMS setiap tahun," ujar Budi. *(Ujang Hasanudin)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005